

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang bersih adalah suatu hal yang di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat Undang-undang tentang UU Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta Nepotisme. membuat undang-undang tersebut tertuju kepada pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain khususnya mahkamah agung di dalam sektor pengadilan militer yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku Namun, beberapa pejabat tidak mengikuti asas-asas yang ditentukan sesuai dengan undang-undang, sehingga mereka melakukan korupsi demi kepuasannya sendiri (Miting, 2020). Maraknya kasus korupsi di Indonesia dapat menimbulkan dampak kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Fauziah, 2017).

Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lembaga publik dapat berjalan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2002). Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam merealisasikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola finansial adalah dengan menyusun laporan dan pelaporan keuangan secara baik dan bernilai. Pada saat menyusun laporan keuangan seharusnya dilaksanakan secara tepat waktu dan mengikuti ketentuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. SAP adalah kaidah-kaidah akuntansi yang telah disepakati untuk digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Instansi atau lembaga Pemerintah sebagai organisasi sektor publik, di tuntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan selalu tanggap dengan lingkungannya dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik secara berkualitas dan transparansi (Gunawan, 2019). Menurut (Rahmadiantri,

2020) kinerja instansi pemerintah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berkualitas. Khususnya kegiatan penyajian informasi akuntansi oleh semua elemen pemerintah, guna membangun kepercayaan masyarakat secara sepenuhnya.

Informasi Akuntansi merupakan hasil suatu proses akuntansi yang meliputi proses pengumpulan, pencatatan, pengindentifikasian, pengukuran, analisis dan pengkomunikasian data-data keuangan. Penyajian informasi akuntansi secara umum disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan bisa dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka informasi akuntansi harus berkualitas. Selanjutnya (Hilton et al, 2000) menjelaskan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, akurat, tepat waktu dan dapat di pahami.

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur oleh beberapa indikator, diantaranya yaitu value for money (VFM) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Selain melalui lakip, baik atau buruknya kinerja sebuah pemerintah daerah dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Fenomena buruknya pelaporan keuangan di kementrian atau instansi pemerintahan seperti yang dikatakan BPK (2018) ini disebabkan karena belasan ribu permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sementara itu, berdasarkan jenis pemeriksaannya yang terdiri atas 607 pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan yang meliputi 7.890 atau 51,12%, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp33,46 triliun dan 7.544 atau 48,88% permasalahan ini di sebabkan oleh lemahnya sistem komitmen organisasi dan etika profesi.

Permasalahan kualitas informasi laporan akuntansi pada lembaga-lembaga keuangan maupun negara masih bisa di lihat dari beberapa fenomena yang di kemukakan oleh para ahli di antaranya yang di kemukakan oleh ketua badan pemeriksa keuangan (BPK), (Anwar Nasution, 2009) mengemukakan bahwa

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) semakin memburuk. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya (2010) menambahkan bahwa bank dituntut untuk lebih transparan dan jujur dalam melaporkan neracanya. Selain itu Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Rohadi, menyatakan bahwa masih banyak bank-bank kecil melakukan manipulasi laporan keuangan (*windows dressing*) dan untuk bank-bank besar masih ada juga yang melakukan manipulasi laporan keuangan (*windows dressing*). Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional yaitu (Sigit Pramono, 2010) mengemukakan kembali bahwa dalam kasus Bank Century, bank tersebut tidak akurat dalam melaporkan kondisi perusahaannya.

Dari fenomena di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan laporan keuangan pemerintah masih buruk. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2015) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik serta keputusan jangka panjang. Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Fenomena lainnya banyak disampaikan oleh para pakar lainnya tidak hanya pada lembaga keuangan tetapi pada lembaga pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh kementerian dalam negeri, bahwa kendati kualitas laporan keuangan sektor publik, terutama di daerah mengalami peningkatan tetapi kami menilai dari sisi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah masih banyak Kelemahannya (Gamawan Fauzi, 2011)

Berdasarkan fenomena yang ada, buruknya laporan keuangan disebabkan oleh lemahnya komitmen organisasi dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Komitmen Organisasi (*Organization Commitment*) adalah kemampuan untuk menyikapi setiap perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh individu diduga dapat mempengaruhi penerimaan terhadap pelaporan keuangan dalam organisasi, hal ini diakibatkan karena individu yang memiliki komitmen organisasi akan bersedia lebih keras demi kepentingan organisasi (Robbins, 2003). Penelitian Malone dan Robbert (1996) menunjukkan hubungan negatif antara komitmen organisasi dan

penerimaan terhadap pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Srimindarti (2012) yang menyatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh pada penerimaan terhadap pelaporan keuangan. Keberhasilan dan kinerja seseorang dan perusahaan dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya. (Sulianti, 2009) menyatakan suatu komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi.

Selain komitmen organisasi, buruknya laporan keuangan juga di sebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Budiarta (2019) mengatakan bahwa dengan adanya Etika profesi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Etika profesi adalah suatu sikap atau prinsip bahwa pekerja dan staff harus menanamkan di dalam individuak mereka masing-masing serta menerapkan dan menjalankan etika profesi mencoba menjelaskan prinsip-prinsipnya seperti integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku professional yang terdapat pada standar APIP. Akan tetapi masih belum dijelaskan pada etika profesi dengan prinsip-prinsip tersebut secara rinci. Beberapa komponen yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi seorang pekerja keuangan, yaitu: etika profesi dan kecerdasan emosional. Sehingga syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pekerja keuangan adalah wajib memegang teguh aturan prinsip-prinsip dasar etika profesi yang berlaku. (Ardianingsih, 2018:32).

Kantor pengadilan militer tinggi-II Jakarta juga menampilkan penyajian realisasi anggaran serta pelaporan keuangan dengan mengeluarkan di web mereka, maka dari itu ini adalah data dari kantor pengadilan militer tinggi-II Jakarta. Tentang realisasi anggaran DIPA dari bulan januari sampai desember, yang terealisasi sekitar 93,65% dan yang belum terealisasi 6,35%. Tentang penyajian laporan keuangan DIPA bulan januari sampai desember tidak adanya unsur relevan, reability, konsistensi dan ketepatanwaktu karena memiliki keterlambatan dalam merealisasikan laporan atau pencatatan keuangan kepada publik yaitu 1

hari sampai dengan 2 hari paling lama. Simpulannya bahwa kantor pengadilan militer belum benar melakukan prinsip perundang-undangan terhadap penyajian laporan keuangan atas adanya reliasasi anggaran mereka, tetapi apakah ada pengaruh seperti variable-variabel lain seperti komitmen organisasi dan etika profesi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang bersifat relevan, reability, konsistensi dan ketepatanwaktu (Dilmilti-II, 2022).

Dalam penelitian sebelumnya, (Pratiwi, 2021) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. (Endiyani, 2021) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rinie, 2019) mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Etika Profesi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei Pada Perusahaan Tekstil di Kota Bandung dan Sekitarnya) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun dalam penelitian (Hamimi, 2021) mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada PT Mopoli Raya mengungkapkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan PT Mopoli Raya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah terkait dengan kualitas pelaporan keuangan yaitu kualitas laporan harus dapat menerapkan kepatuhan perundang-undangan dan prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh kantor pengadilan militer tinggi-II Jakarta (selanjutnya penulis menyebut dilmilti-II Jakarta). Pemerintah khususnya di dalam sektor pengadilan militer sebagai organisasi sektor publik, dituntut agar memiliki kualitas pelaporan keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan selalu tanggap dengan lingkunganya dengan penyajian laporan yang relevan, reability, konsistensi, materialistis, ketepatanwaktu dan dapat di pahami.

Kualitas pemerintah khususnya di sektor pengadilan militer harus memiliki sikap yang optimal pada akhirnya harus dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas penyajian laporan keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Kepuasan ini menjadi salah satu landasan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada. Pada kenyataannya, masih banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia adanya ketidakpuasan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah. Fenomena indikasi ketidakpuasan masyarakat dalam kualitas pelaporan keuangan pemerintah sudah di tahap hampir tidak percaya maka dari itu, pemerintah harus menarik rasa kepercayaan masyarakat yang full dengan cara menerapkan prinsip-prinsip laporan keuangan dan kepatuhan kepada perundang-undangan.

Oleh karena itu, komitmen organisasi dan etika profesi menjadi semakin penting untuk diimplementasikan secara berkelanjutan di setiap daerah di Indonesia, termasuk pemerintahan khususnya di sektor pengadilan militer yaitu di milti-II Jakarta. Aktivitas komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan, serta staff untuk mentaati dan melaksanakan peraturan dan standar kerja yang sudah ditetapkan. Serta menerapkan kode etik profesi akan mewujudkan pegawai yang menerapkan prinsip-prinsip dalam penyajian laporan keuangan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan yang dibahas, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu membahas mengenai pengaruh komitmen organisasi dan etika profesi terhadap kualitas pelaporan keuangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan di lakukan di rumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di milti-II Jakarta?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di milti-II Jakarta?
3. Apakah komitmen organisasi dan etika profesi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di milti-II Jakarta?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan dilmilti-II Jakarta.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kualitas pelaporan keuangan dilmilti-II Jakarta.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi dan etika profesi terhadap kualitas pelaporan keuangan dilmilti-II Jakarta.

F. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis kinerja kualitas pelaporan keuangan Pemerintah khususnya di sektor pengadilan militer serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai komitmen organisasi dan etika profesi.

2. Bagi akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi sektor publik mengenai komitmen organisasi dan etika profesi yang berkaitan dengan kualitas kinerja pelaporan keuangan Pemerintah khususnya di sektor pengadilan militer.

3. Bagi Dilmilti

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi staff dilmilti-II Jakarta dalam mengelola komitmen organisasi dan etika profesi yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi instansi.

4. Bagi pihak lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan komitmen organisasi dan etika profesi yang berpengaruh terhadap kinerja kualitas pelaporan keuangan pemerintah khususnya sektor pengadilan

militer, dilmilti-II jakarta dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab 2: Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, teknik analisis data.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran bagi peneliti agar penelitian lebih baik untuk kedepannya.

